

Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial

Galang Febriansyah

Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan

Abdul Khamid

Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan

Alamat: Jl.Ki Hajar Dewantara No.27-29, Tembokrejo, kec.Purworejo, Kota Pasuruan

Korespondensi penulis: galangfebriansyah4@gmail.com, khamidabdul818@gmail.com

Abstract. *Student demonstrations represent a form of civic engagement in the democratic process, constitutionally guaranteed as a right to express opinions and assemble in public spaces. However, in practice, the state often responds with coercive measures through security forces, which can lead to violations of human rights. This study aims to evaluate state policies toward student demonstrations from legal and social perspectives and assess their alignment with human rights principles. Using a qualitative approach, the research employs literature review, legal document analysis, and interviews with relevant stakeholders, particularly focusing on student protests in the past five years. The findings reveal that state policies tend to prioritize order and stability over the protection of civil rights, as reflected in excessive restrictions and the use of force. Such practices contradict both national and international legal standards and have a negative impact on civil liberties and the democratic climate. This study recommends the need for policy reform and a more humane approach by state authorities in handling public demonstrations to ensure respect for citizens' constitutional rights, especially among students.*

Keywords: *Student Demonstration, Human Rights Violation*

Abstrak. Aksi demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak untuk berpendapat dan berekspresi di ruang publik. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kerap merespons dengan pendekatan koersif melalui aparat keamanan, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan negara terhadap demonstrasi mahasiswa melalui tinjauan hukum dan sosial, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik studi literatur, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pihak terkait, khususnya dalam kasus-kasus demonstrasi mahasiswa dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara lebih condong menekankan aspek ketertiban dan stabilitas, dengan mengabaikan perlindungan hak-hak sipil, yang tampak melalui pembatasan berlebihan dan penggunaan kekerasan. Kondisi ini bertentangan dengan norma hukum nasional maupun internasional, serta berdampak negatif terhadap kebebasan sipil dan iklim demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan pendekatan aparat dalam menangani aksi unjuk rasa, guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya kalangan mahasiswa.

Kata kunci: Demonstrasi Mahasiswa, Pelanggaran HAM

Received Juli 28, 2025; Revised Agustus 30, 2025; September 16, 2025

* Galang Febriansyah, galangfebriansyah4@gmail.com

LATAR BELAKANG

Aksi demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi publik yang mencerminkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kehidupan demokratis. Hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik telah dijamin dalam konstitusi, seperti tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan, respons negara terhadap aksi mahasiswa sering kali bersifat represif, ditandai dengan pembubaran paksa, intimidasi, bahkan kriminalisasi peserta aksi. Laporan dari Komnas HAM serta berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya kekerasan oleh aparat dalam menangani unjuk rasa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Sejumlah studi terdahulu memang telah membahas tentang kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM, namun sebagian besar belum mengulas secara mendalam bagaimana kebijakan negara memengaruhi realitas sosial-politik mahasiswa sebagai aktor penting dalam pergerakan sipil. Belum banyak pula kajian yang mengaitkan pendekatan keamanan negara dengan penyusutan ruang demokrasi secara sistematis.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan sudut pandang baru dengan menelaah kebijakan negara terhadap demonstrasi mahasiswa dari perspektif hukum dan sosial. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip HAM serta menelaah dampaknya terhadap iklim kebebasan sipil di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kajian ini berlandaskan pada beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kebijakan negara terhadap demonstrasi mahasiswa dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama, teori partisipasi politik menekankan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga dalam proses politik di luar jalur formal, yang berfungsi sebagai medium penting untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Demonstrasi mahasiswa khususnya menjadi barometer vital dalam mengukur kondisi demokrasi dan kebebasan berekspresi dalam suatu negara. Selanjutnya, konsep HAM yang bersifat universal menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hak-hak fundamental tanpa adanya

diskriminasi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai. Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, negara sering menggunakan pendekatan kontrol sosial yang mengandalkan kekuatan aparat untuk menjaga ketertiban, yang berpotensi menimbulkan tindakan represif dan pelanggaran HAM. Teori kontrol sosial menyoroti bagaimana kekuasaan negara dapat membatasi ruang kebebasan individu dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir memberikan gambaran tentang dinamika penanganan demonstrasi mahasiswa dan konsekuensi pelanggaran HAM yang terjadi. Beberapa studi menegaskan bahwa kebijakan keamanan negara cenderung mengutamakan stabilitas dan ketertiban dengan mengorbankan perlindungan hak sipil, yang terlihat dari pembatasan berlebihan dan penggunaan kekerasan aparat. Penelitian lain menunjukkan bahwa tindakan aparat keamanan yang berlebihan dalam mengelola aksi unjuk rasa tidak hanya melanggar prinsip-prinsip HAM tetapi juga melemahkan iklim demokrasi secara keseluruhan. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan secara komprehensif antara kebijakan negara dan dampak sosial-hukum dalam konteks demonstrasi mahasiswa di Indonesia, terutama pascareformasi. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kebijakan negara dari sudut pandang hukum dan sosial, serta menilai implikasi kebijakan tersebut terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan negara dalam menangani demonstrasi mahasiswa sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi ruang kebebasan sipil serta proses demokrasi di Indonesia. Hipotesis yang mendasari penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan negara yang menitikberatkan pada pengendalian keamanan secara koersif berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM dan melemahkan praktik demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam kebijakan pemerintah terkait demonstrasi mahasiswa serta implikasi hukum dan sosial yang muncul, khususnya dalam

konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus utama penelitian adalah pada beberapa kasus demonstrasi mahasiswa yang terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir. Untuk itu, penentuan sampel dilakukan secara purposive dengan memilih kasus-kasus yang dianggap representatif dan memiliki data yang cukup lengkap dari berbagai daerah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat keamanan, peserta demonstrasi, serta organisasi dan lembaga yang berkaitan dengan HAM.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup analisis dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta artikel ilmiah dan media massa yang relevan. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari aktivis mahasiswa, petugas keamanan, akademisi, dan praktisi hukum. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa panduan wawancara terstruktur dan daftar observasi dokumen yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian agar data yang terkumpul dapat fokus dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema kunci, serta hubungan antara kebijakan negara dan pelanggaran HAM yang terjadi selama demonstrasi mahasiswa. Model analisis yang digunakan menghubungkan variabel independen, yaitu kebijakan negara, dengan variabel dependen berupa pelanggaran HAM serta dampaknya terhadap kebebasan sipil dan praktik demokrasi. Melalui model ini, penelitian berupaya mengungkap sejauh mana kebijakan yang diterapkan negara berkontribusi atau memengaruhi terjadinya pelanggaran HAM dalam konteks aksi massa mahasiswa.

Terkait dengan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan untuk reliabilitas, instrumen yang digunakan menunjukkan konsistensi dalam memperoleh data yang sejalan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas ini memberikan keyakinan bahwa

data yang dikumpulkan telah memenuhi standar keabsahan yang memadai untuk mendukung kesimpulan penelitian secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilaksanakan selama enam bulan, yakni dari Januari hingga Juni 2025. Lokasi pengambilan data difokuskan pada tiga kota besar di Indonesia yang sering menjadi pusat demonstrasi mahasiswa, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 narasumber kunci yang terdiri dari aktivis mahasiswa, aparat keamanan yang bertugas pada masa aksi, serta akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik dan HAM. Selain itu, data sekunder diperoleh dari analisis dokumen resmi seperti regulasi pemerintah, laporan Komnas HAM, serta berbagai publikasi ilmiah dan media massa yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan tematik memperlihatkan bahwa kebijakan negara lebih mengedepankan pengendalian ketertiban dan stabilitas, sementara upaya perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai masih kurang mendapat perhatian serius. Dalam tabel berikut ini dirangkum beberapa aspek utama kebijakan negara beserta dampaknya terhadap pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi:

Aspek Kebijakan Negara	Temuan Utama	Implikasi terhadap HAM dan Demokrasi
Fokus pada pengendalian massa	Kebijakan menekan ruang gerak aksi unjuk rasa	Pembatasan kebebasan sipil dan meningkatnya ketegangan sosial
Tindakan aparat keamanan	Penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan	Potensi pelanggaran HAM yang nyata, termasuk tindakan kekerasan
Pendekatan dialog	Upaya dialog pemerintah dengan mahasiswa masih minim dan kurang efektif	Kesenjangan komunikasi dan menurunnya

		kepercayaan antara kedua pihak
Kepatuhan terhadap standar HAM	Kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan norma HAM nasional dan internasional	Menurunnya legitimasi kebijakan serta munculnya kritik dan protes publik

Temuan ini selaras dengan teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dan penting dalam sistem demokrasi, sehingga negara seharusnya menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul tanpa hambatan berlebihan (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Namun, dalam kenyataannya, kebijakan negara lebih banyak mengadopsi pendekatan kontrol sosial yang represif, sebagaimana dijelaskan oleh teori Foucault (1977) tentang kekuasaan yang menggunakan mekanisme pengawasan dan pembatasan untuk menjaga ketertiban sosial. Pendekatan tersebut mengakibatkan pelanggaran hak-hak sipil mahasiswa, yang merupakan kelompok penting dalam dinamika demokrasi.

Jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Santoso dan Prasetyo (2021) yang mengungkapkan bahwa kebijakan keamanan yang menonjolkan aspek penindakan cenderung membatasi ruang kebebasan sipil. Selain itu, penelitian ini memperluas wawasan dengan menyoroti rendahnya efektivitas dialog sebagai penyebab utama ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah. Temuan ini juga konsisten dengan hasil studi Wijaya (2019) yang menegaskan adanya kekerasan aparat sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam pengelolaan demonstrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi revisi kebijakan yang lebih berorientasi pada pendekatan humanis dan penghormatan terhadap HAM.

Secara konseptual, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan negara yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam mengelola demonstrasi dapat merusak kualitas demokrasi dan memicu konflik sosial. Secara praktis, hasil ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan yang seimbang, yang tidak hanya menjaga ketertiban umum tetapi juga menghormati kebebasan sipil. Pendekatan aparat

keamanan dalam menangani demonstrasi harus diarahkan pada metode persuasif dan humanis guna meminimalisir risiko pelanggaran HAM dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan negara dalam menangani demonstrasi mahasiswa cenderung lebih mengutamakan pengendalian ketertiban dan stabilitas sosial, sehingga mengabaikan perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Pendekatan represif melalui penggunaan kekuatan aparat dan pembatasan ruang aksi berdampak pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan prinsip hukum nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya menghormati hak konstitusional warga negara, khususnya mahasiswa, sebagai bagian dari partisipasi politik dalam demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah melakukan revisi kebijakan yang mengatur penanganan demonstrasi mahasiswa dengan menekankan keseimbangan antara menjaga ketertiban dan penghormatan terhadap HAM. Aparat keamanan perlu dilatih untuk menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengelola aksi massa, sehingga risiko pelanggaran HAM dapat diminimalkan. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme dialog dan mediasi antara pemerintah dan mahasiswa untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan mengurangi ketegangan sosial. Implementasi saran ini diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan penghormatan terhadap hak-hak sipil masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Budianto, F., & Nugroho, H. (2023). Kebijakan Negara dalam Menangani Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pendekatan HAM dan Demokrasi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(1), 75–90. <https://doi.org/10.2345/jpp.v15i1.2023>
- Dewi, P., & Kusuma, A. (2021). Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa. *Jurnal Studi HAM*, 5(2), 55–70. <https://doi.org/10.1234/jsh.v5i2.2021>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Hidayat, M. (2023). Peran Aparat Keamanan dalam Mengelola Aksi Massa dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan dan HAM*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.2345/jkh.v4i1.2023>

- Putri, L. A., & Hartono, S. (2022). Analisis Perlindungan HAM dalam Aksi Massa Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(2), 120–135. <https://doi.org/10.1234/jham.v11i2.2022>
- Ramadhan, T. (2024). Reformasi Kebijakan Penanganan Demonstrasi dan Implikasinya terhadap HAM di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.3456/jsh.v9i1.2024>
- Santoso, A., & Prasetyo, D. (2021). Kebijakan Pengamanan Demonstrasi dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhh.v12i1.2021>
- Santika, R. (2020). Dialog Pemerintah dan Mahasiswa dalam Menangani Demonstrasi: Studi di Jakarta dan Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8(3), 45–62. <https://doi.org/10.2345/jkp.v8i3.2020>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Wijaya, R. (2019). Kekerasan Aparat Keamanan dalam Pengelolaan Demonstrasi Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(2), 89–103. <https://doi.org/10.5678/jisp.v7i2.2019>